



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Megubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operational;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 249);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. PENDAPATAN DAERAH

a.Semula	Rp.	4.105.706.151.102,00	
b.Bertambah/Berkurang)	Rp.	(328.499.660.102,00)	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 3.777.206.491.000,00

2. BELANJA DAERAH

a.Semula	Rp.	4.558.807.845.879,00	
b.Bertambah/Berkurang)	Rp.	(245.653.654.901,62)	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 4.313.154.190.977,38
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.		(535.997.699.977,38)

3. PEMBIAYAAN

a.Penerimaan			
1)Semula	Rp.	453.151.694.777,00	
2)Bertambah/(berkurang)	Rp.	82.846.005.200,38	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 535.997.699.977,38
b.Pengeluaran			
1)Semula	Rp.	50.000.000,00	
2)Bertambah/(berkurang)	Rp.		
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 50.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	535.947.699.977,38
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubah	Rp.	0,00

Pasal 2

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	1.082.114.965.517,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(104.925.000.000,00)	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp. 977.189.965.517,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	133.562.835.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(26.766.375.000,00)	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp. 106.796.460.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	55.838.250.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(13.636.669.175,00)	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan			Rp. 42.201.580.825,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	34.946.644.585,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.280.000.073,00)	
			Rp. 36.226.644.658,00

(3) Dana Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	111.075.094.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.092.067.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp. 142.167.161.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	1.448.989.572.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(148.028.823.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp. 1.340.960.749.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	1.178.928.790.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(93.632.759.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp. 1.085.296.031.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan			Rp. 20.000.000.000,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	250.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	26.117.899.000,00	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan			Rp. 26.367.899.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	2.479.309.063.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.447.208.840,80

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. **2.289.756.271.840,80**

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	2.079.498.782.879,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(256.100.863.742,42)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. **1.823.397.919.136,58**

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	1.251.227.423.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(17.305.351.243,20)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. **1.233.922.071.756,80**

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	21.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(15.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. **6.000.000.000,00**

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. **0,00**

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	767.797.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.973.288.477,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. **760.824.211.523,00**

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. **3.500.000.000,00**

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	425.784.140.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(159.593.535.639,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. **266.190.604.361,00**

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 0,00

h. Belanja Tidak terduga

1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	213.319.384.200,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 219.319.384.200,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	75.875.281.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1515.814.000,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 5.359.467.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	1.059.855.024.104,64	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(61.496.230.602,33)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 998.358.793.502,31

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	1.013.768.477.774,36	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(194.088.819.140,09)	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 819.679.658.634,27

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	453.151.694.777,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	82.846.005.200,38	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan			Rp. 535.997.699.977,38

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	50.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan			Rp. 50.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya berjumlah

1) Semula	Rp.	113.151.694.777,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	82.846.005.200,38	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 195.997.699.977,38

b. Penerimaan Pinjaman**Daerah**

1) Semula Rp. 340.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. **340.000.000.000,00**

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 20.000.000.000,00

1) Semula Rp. 50.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. **50.000.000.,00****b. Pembayaran Pokok Utang**

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Rp. **0,00****Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringakasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kemabali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 20 Oktober 2020

Pjs. GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

AGUS PATONI

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


Ttd

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (2-149/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008